
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DI KOTA SEMARANG

Herbasuki, NC¹

Abstract

Poverty is a main issue to solve. National Urban Program for People Empowerment (PNPM MP) has main program to alleviate poverty by involving participation of the villagers. The purpose of the research is to analyze the implementation and identify the inhibiting factors of PNPM MP, in Mangunharjo residence Tembalang District Semarang. The approach used is descriptive qualitative approach.

The implementation of PNPM MP in Mangunharjo was started in 2007. Direct People Assistance (Bantuan Langsung Masyarakat/BLM) received are used to alleviate poverty through three areas: economy, social and environment.

Self-Assistance Groups (Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM) has easy access to obtain additional capital to run a business. Poor villagers are assisted through house rehabilitation program and education package. The negative Impacts also come up that there is social envy especially for those who do not receive the assistance.

The inhibiting factors of the implementation of PNPM MP in Mangunharjo Residence include the internal factors: The limited number of the operating unit members, Some BKM members are not active in some activities, The KSM members do not have sufficient skill to arrange the proposal. While the external factors include: the distrust of villagers toward the credibility of KSM members to implement physical projects, and the envy shown by those who do not get BKM.

To increase the awareness of the BKM and KSM members are through trainings, assisting KSM to prepare the project proposals and even the reports regularly and continuously. There should be a socialization to the villagers about the programs managed by BKM through regular meetings of RT / RW or the engagement of the community leaders to take a part routinely in the annual meeting forum of the villagers (Rembug Warga Tahunan/RWT).

Keywords : *Poverty Alleviation , Villagers Empowerment*

PENDAHULUAN

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak awal reformasi (tahun 1999) sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis dengan menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2007 telah dirintis

¹ Staf Pengajar Program Studi S1 Administrasi Publik FISIP - Undip

untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun 2007, P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals (MDGs)* sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.

Pada tahun 2008 keberlanjutan pelaksanaan P2KP diperluas menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), dengan mengalokasikan tambahan dana yang cukup signifikan pada tahun anggaran 2008 yang mencakup 8.813 Kelurahan di 995 kecamatan tersebar pada 245 kota/kabupaten. Saat ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang tersebar di sekitar 1.153 kecamatan di 268 /kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 860 ribu Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM (Kementerian PU, 2012).

PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) mempunyai tujuan untuk memberikan perbaikan sosial ekonomi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat kelurahan. BKM inilah yang menjadi fasilitator pelaksanaan program melalui Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) yang tersebar dalam lingkup rukun warga (RW). Kegiatan yang dilakukan antara lain di bidang perekonomian, sosial dan fisik.

PNPM Mandiri Perkotaan khususnya yang dilaksanakan di kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang kota Semarang berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan. Ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Permasalahan tersebut diantaranya terbatasnya kemampuan anggota KSM dalam bidang administrasi keuangan, kecemburuan masyarakat.

Tujuan Penelitian :

1. Menganalisis implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di kelurahan Mangunharjo, kecamatan Tembalang Kota Semarang
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di kelurahan Mangunharjo, kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Pendekatan implementasi ada tiga macam yaitu pendekatan atas-bawah (*topdown*), pendekatanbawah-atas (*bottom-up*), dan pendekatan *mix* antara *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *topdown* pemerintah membuat keputusan peraturan untuk digunakan dan ditaati, sedangkan pendekatan *bottom-up* adalah keinginan masyarakat disalurkan pada pemerintah kemudian pemerintah yang membuat peraturan dengan kewenangan yang dimiliki melalui pertimbangan-pertimbangan. Model implementasi dengan pendekatan *bottom-up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*topdown*). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom-up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan *bottom-up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Proses dalam institusi kebijakan sangat kompleks, karena banyaknya fenomena maka disederhanakan dengan model supaya mengetahui bagaimana proses kebijakan publik itu berlangsung, karenanya kedua pendekatan didukung oleh model-model yang menyertainya. Model didasarkan pada kesamaan-kesamaan antara satu teori dengan teori atau satu kenyataan dengan kenyataan yang lain dan belum terbukti kesahihannya. Dalam membahas implementasi PNPM MP model yang digunakan adalah *top down* yaitu keinginan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota Semarang) dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau menurut Ryant Nugroho (2008, 454) disebut dengan implementasi kebijakan publik yang bersifat partisipatif.

Pemberdayaan pada saat ini telah menjadi program nasional melalui PNPM, sehingga tidak ada satupun SKPD yang tidak memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan di seluruh provinsi, kabupaten maupun kota sudah dibentuk organisasi khusus yang bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas), bahkan sampai dengan tingkat kelurahan atau desa (LPMK/LPMD).

Banyak makna tentang pemberdayaan, namun pada hakekatnya pemberdayaan memberikan pilihan tentang kesempatan yang semakin luas atau pembangunan yang digerakkan masyarakat (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007). Swift dan Levin (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012) mengatakan:

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk :

1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. PNPM MP merupakan suatu program yang memberikan ruang kepada masyarakat miskin untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan merumuskan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam wadah KSM dan difasilitasi oleh BKM.

Pendekatan yang dipilih adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu secara terperinci, yang pada akhirnya akan bermuara pada pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti yakni untuk menghasilkan gambaran mengenai implementasi PNPM MP. Menurut Dunn (2003 : 234) model penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekwensi-konsekwensi pilihan-pilihan yang ada.

Sesuai dengan tujuan penelitian, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif, sehingga data yang diperoleh akan diuraikan serinci mungkin, dengan metode analisis kualitatif. Guna melihat validitas data maka dilakukan dengan pendekatan triangulasi yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh (Moleong 2001 : 178). Data yang diperoleh merupakan bahan yang akan diamati dan analisis. Kemudian berdasarkan data tersebut dilakukan interpretasi.

PEMBAHASAN

PNMP MP merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah (*top down*) dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (*botton up*) untuk mengentaskan kemiskinan yang merupakan masalah paling menonjol di negeri ini. Masyarakat secara

bersama-sama difasilitasi untuk merencanakan kegiatan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Bagaimana masyarakat diberikan pengetahuan tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan memberdayakan segenap potensi yang ada di sekeliling mereka.

Implementasi PNPM MP di Kelurahan Mangunharjo Tembalang dimulai sejak tahun 2007. Pengelola yang tidak profesional menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun, karena ulah sebagian kecil oknum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada aparat hukum. Pada tahun 2010 BKM Bangun Sejahtera berusaha bangkit kembali untuk turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang.

Adanya keterlibatan aktif masyarakat melalui peran ketua RW dihimpun modal awal sebesar dua juta per RW. Dana ini oleh BKM diserahkan kepada Unit Pelaksana Keuangan (UPK) untuk didistribusikan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada di lingkungan kelurahan Mangunharjo. Partisipasi aktif masyarakat dan transparansi dari pengelola BKM mendapatkan respon yang positif dari koordinator PNPM MP kota Semarang. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) mulai mengucur kembali. Dalam tiga tahun terakhir jumlah bantuan yang diterima oleh BKM Bangun Sejahtera sebesar Rp 187.400.000,00 yang digunakan untuk ketiga bidang yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Untuk bidang ekonomi kegiatan dilakukan dengan melakukan pinjaman bergulir melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang minimal terdiri dari lima orang anggota dalam satu lingkup rukun warga. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang sosial meliputi pembelian alat perlengkapan posyandu, pelatihan menjahit dan pengadaan motor sampah. Bidang lingkungan melakukan kegiatan antara lain pembuatan instalasi air bersih dan paving, perbaikan rumah pintar, pembangunan talud dan saluran air dan rehabilitasi rumah.

PNMP MP merupakan program yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat miskin. PNPM MP sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang luas kepada kelompok masyarakat miskin untuk berani menyuarkan pendapat, kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu alternatif pilihan terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan perencanaan untuk menentukan kegiatan yang harus dilakukan dengan difasilitasi oleh pengurus BKM sesuai dengan pendapat Winarno sebagai berikut (Winarno,2002 :28) :

1. Tahap penyusunan agenda
Dilakukan dengan menyusun dokumen pronangkis bersama-sama dengan masyarakat miskin yang menghasilkan identifikasi permasalahan.
2. Tahap formulasi kebijakan
Masalah-masalah yang ada dimusyawarahkan untuk mencari dan menentukan alternatif pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada.
3. Tahap adopsi kebijakan
Berdasarkan hasil musyawarah dipilih alternatif tindakan terbaik.
4. Tahap implementasi kebijakan
Alternatif tindakan dilakukan melalui tiga bidang yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan
5. Tahap penilaian kebijakan
Kegiatan yang sudah dilakukan evaluasi apakah mampu memecahkan persoalan yang ada.

Dukungan masyarakat melalui ketua RW dengan memberikan bantuan modal awal sebesar Rp 2.000.000,00 per RW sangat membantu tugas BKM Bangun Sejahtera. Bantuan ini dapat diartikan sebagai komitmen warga dalam mendukung program PNMP MP kelurahan Mangunharjo. Bantuan modal awal inilah yang menjadikan kelurahan Mangunharjo mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini sangatlah sesuai dengan apa yang dikatakan Van Meter dan Van Horn (dalam Samodra Wibawa, dkk, 1994 : 19) bahwa lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif merupakan syarat untuk keberhasilan keputusan/kebijakan yang diambil. Adanya swadaya masyarakat sebesar Rp 88.500.000,00 dalam tiga tahun terakhir menunjukkan dukungan yang positif masyarakat terhadap implementasi PNPM MP.

Menurut Grindle (Samodra Wibawa, dkk, 1994 : 23) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual

dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Hal ini tergantung pada *implementability* program tersebut yang dapat dilihat pada *content of policy and context of implementation*.

Content of policy atau isi kebijakan mencakup diantaranya mencakup derajat perubahan yang diinginkan, para pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Tujuan yang diinginkan adalah pengentasan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang bersangkutan. Para pelaksana (BKM) dengan kesadaran dan kesabaran yang tinggi membimbing, mengarahkan kelompok sasaran (KSM) agar dapat mengelola bantuan yang diterima sesuai dengan peruntukannya. Masyarakat mempunyai akses mudah dalam mendapatkan modal berusaha, mendapatkan ketrampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan kondisi lingkungan tempat tinggal.

Context of implementation yang dimaksud Grindle diantaranya mencakup kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Bagaimana BKM sebagai koordinator senantiasa patuh memenuhi kewajiban dan tanggap terhadap kondisi riil yang dihadapi. Ketika bantuan diberikan kepada warga miskin dan banyak yang macet, maka BKM memberikan arahan kepada unit pelaksana keuangan untuk memberikan bantuan bagi mereka yang mempunyai usaha. Masyarakat miskin mendapatkan akses untuk berbelanja kebutuhan mereka dengan cara mengangsur, disamping itu juga ada bantuan langsung seperti untuk rehabilitasi rumah, bantuan /paket pendidikan untuk anak-anak usia sekolah.

KSM dibentuk melalui rekomendasi RT/RW atau melalui penunjukan BKM untuk pelaksana kegiatan program yang bersifat fisik. Adanya mekanisme tanggungjawab renteng untuk mengembalikan dana pinjaman membuat KSM selektif dalam menerima anggota. KSM harus paham karakter masing-masing anggotanya dan dalam batas lingkup rukun warga. Sanksi tegas dilakukan cara mengeluarkan anggota yang tidak patuh terhadap kewajiban membuat KSM menjadi lebih berkembang. Pinjaman KSM dapat meningkat sesuai dengan prestasi dan *track record* mereka dalam mengelola dana pinjaman.

Dampak yang diharapkan dengan adanya PNPM MP menurut Grindle adalah dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok, dan perubahan dan penerimaan oleh masyarakat (Samodra Wibawa, dkk, 1994 : 23). Masyarakat dengan kesadarannya

memberikan kontribusi sebagai modal awal BKM Bangun Sejahtera dan dijadikan dasar oleh koordinator PNPM Kota Semarang untuk memberikan bantuan langsung masyarakat (BLM). Masyarakat mempunyai akses mudah dalam mendapatkan tambahan modal untuk berusaha, dan secara kelompok merekatkan tali silaturahmi diantara anggota karena adanya tanggungjawab renteng kelompok apabila ada anggota yang belum dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Masyarakat miskin dibantu dengan merehabilitasi rumah mereka dengan kegiatan bedah rumah dan adanya bantuan langsung yang berupa paket pendidikan dari kegiatan usaha sosial yang telah dilaksanakan. Dampak negatif pun muncul yaitu adanya kecemburuan sosial bagi mereka yang tidak menerima bantuan. Bantuan yang diusulkan tidak harus disetujui oleh BKM setelah melewati musyawarah dengan pengurus RT/RW. Bantuan diberikan dengan memperhatikan saran RT/RW tentang kredibilitas kelompok maupun peninjauan langsung bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik.

Ada dua faktor yang dapat dianggap sebagai penghambat implementasi PNPM MP di kelurahan Mangunharjo, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah keterbatasan sumberdaya pelaksana khususnya unit-unit pelaksana yang hanya terdiri dari satu orang saja dan ketidakaktifan anggota dalam rapat atau kegiatan lain yang diadakan BKM. Demikian pula untuk anggota KSM yang tidak taat terhadap kewajiban yang harus dipenuhi yaitu mengangsur secara tepat waktu pinjaman yang diberikan oleh BKM kepada kelompoknya. Disamping itu keterbatasan kemampuan KSM dalam menyusun proposal dan membuat laporan pertanggungjawaban menjadi hambatan tersendiri.

Faktor eksternal yang dapat dianggap sebagai penghambat adalah penolakan oleh kelompok masyarakat terhadap program yang dilaksanakan KSM seperti pembuatan saluran air bersih, pavingisasi. Penolakan ini karena adanya ketidakpercayaan terhadap kredibilitas KSM pelaksana, disamping bantuan yang diberikan BKM juga dianggap kurang untuk mengerjakan kegiatan fisik di lingkungan mereka. Kecemburuan kelompok masyarakat yang tidak menerima bantuan BKM juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan PNPM MP. Penentuan kelompok sasaran bantuan telah dimusyawahkan dalam forum BKM dengan mempertimbangkan aspek kredibilitas kelompok yang bersangkutan.

PENUTUP

Simpulan

1. Implementasi PNPM MP di kelurahan Mangunharjo dimulai sejak tahun 2007. BLM yang diterima digunakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan melalui tiga bidang yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Kegiatan bidang ekonomi dilakukan dengan pengalangan dana oleh KSM yang berjumlah 24 unit dengan aset yang berjumlah sekitar Rp 120.000.000,00. Kegiatan bidang ekonomi merupakan jantung BKM Bangun Sejahtera dalam melaksanakan PNPM MP di kelurahan Mangunharjo. Kegiatan bidang sosial antara lain dilakukan dengan pengadaan motor sampah, pembelian alat perlengkapan posyandu dan pelatihan menjahit. Kegiatan bidang lingkungan dilakukan dengan pembangunan instalasi air bersih, perbaikan rumah pintar, rehabilitasi rumah, perbaikan jalan dengan paving, pembangunan talud dan saluran air.
2. Dampak positif yang muncul adalah kontribusi masyarakat sebagai modal awal BKM Bangun Sejahtera. Kontribusi ini sebagai dasar oleh koordinator PNPM Kota Semarang untuk memberikan bantuan langsung masyarakat (BLM). Masyarakat mempunyai akses mudah dalam mendapatkan tambahan modal untuk berusaha, dan secara kelompok merekatkan tali silaturahmi diantara anggota karena adanya tanggungjawab renteng kelompok apabila ada anggota yang belum dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Masyarakat miskin dibantu dengan merehabilitasi rumah mereka dengan kegiatan bedah rumah dan adanya bantuan langsung yang berupa paket pendidikan dari kegiatan usaha sosial yang telah dilaksanakan. Dampak negatif pun muncul yaitu adanya kecemburuan sosial bagi mereka yang tidak menerima bantuan. Bantuan yang diusulkan tidak harus disetujui oleh BKM setelah melewati musyawarah dengan pengurus RT/RW. Bantuan diberikan dengan memperhatikan saran RT/RW tentang kredibilitas kelompok maupun peninjauan langsung bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik.
3. Faktor penghambat implementasi PNPM MP di kelurahan Mangunharjo yaitu :
Faktor internal, meliputi : keterbatasan jumlah anggota unit pelaksana, ketidakaktifan sebagian anggota BKM dalam berbagai kegiatan, keterbatasan ketrampilan anggota KSM dalam penyusunan proposal dan pertanggungjawaban laporan kegiatan. Faktor eksternal, meliputi : ketidakpercayaan masyarakat

terhadap kredibilitas KSM pelaksana kegiatan fisik, kecemburuan kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan BKM.

Rekomendasi

1. Perlu peningkatan kesadaran anggota BKM dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Koordinator PNPM MP Kota Semarang, dan melakukan silaturahmi ke rumah anggota yang pasif.
2. Perlu dilakukan pendampingan anggota BKM kepada kelompok-kelompok KSM dalam penyusunan proposal maupun laporan pertanggungjawaban secara rutin dan berkesinambungan dan mengikutsertakan anggota KSM dalam pelatihan yang dikelola oleh BKM maupun Koordinator PNPM MP Kota Semarang.
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program kegiatan yang dikelola oleh BKM baik melalui pertemuan rutin RT/RW atau melibatkan tokoh-tokoh masyarakat secara bergiliran dalam forum Rembug Warga Tahunan (RWT).

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William.N, 2003, diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk, Pengantar Analisis Kebijakan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Mardikanto, Totok; Soebiato, Poerwoko, 2012, Pemberdayaan Masyarakat, Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung
- Nugroho, Iwan dan Rochim Dahuri, 2004, Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, LP3ES, Jakarta
- Parsons, Wayne, 2011, *Public Policy*: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Riant Nugroho, 2008, *Public Policy*, PT Gramedia, Jakarta
- Samodra Wibawa dkk, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, CV. Alfa Beta, Bandung
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wrihatnolo, Randy R., dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2007, Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Elex Media Komputindo, Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) tahun 2005 – 2025;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2015;

Keputusan Walikota Semarang No 400/451 tahun 2011 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang tahun 2011.